



# EKSPLORASI KEBIJAKAN MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PEMERINTAHAN PRABOWO-GIBRAN DI KEPULAUAN BELITUNG: TANTANGAN DAN SOLUSI DI SEKOLAH DASAR

Hariato<sup>1</sup>, Hidayati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Bangka Belitung, Indonesia

Email: [hariato-fh@ubb.ac.id](mailto:hariato-fh@ubb.ac.id)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2274>

## Sections Info

### Article history:

Submitted: 23 March 2026

Final Revised: 11 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 15 June 2026

### Keywords:

MBG

Public Policy

Elementary School

Child Nutrition



## ABSTRACT

*The Free Nutritious Meals Program is one of the national strategic policies aimed at improving the nutritional quality of children and students as a foundation for human resource development toward Indonesia Emas 2045. This study aims to explore the MBG policy in elementary schools, identify challenges and solutions in its implementation, so that the program can run effectively and sustainably. This study uses a qualitative approach with an exploratory descriptive-analytical method. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, questionnaires, and document analysis, involving school principals, teachers, and students at five elementary schools that have implemented or are currently piloting the MBG program. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions, supplemented by data validity testing. The research results indicate that the MBG program received a positive response from schools because it was deemed relevant to students' needs and capable of improving student attendance and social interaction. However, program implementation still faces various challenges, such as logistical constraints, the absence of uniform nutritional standards, a shortage of specialized management staff, weak cross-sectoral coordination, limited local funding, and issues regarding the cleanliness of MBG kitchens.*

## ABSTRAK

*Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan pelajar sebagai fondasi Pembangunan SDM menuju Indonesia Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan MBG di sekolah dasar, mengidentifikasi tantangan, dan Solusi dalam pelaksanaannya agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis eksploratif. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, angket, dan studi dokumentasi, dengan melibatkan kepala sekolah, guru, dan siswa di lima sekolah dasar yang telah atau sedang melaksanakan uji coba MBG. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi dengan uji keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program MBG mendapat respons positif dari pihak sekolah karena dinilai relevan dengan kebutuhan peserta didik dan mampu meningkatkan kehadiran serta interaksi sosial siswa. Namun, implementasi program masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan logistik, belum adanya standar gizi yang seragam, minimnya tenaga pengelola khusus, lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan pendanaan daerah, serta persoalan kebersihan dapur MBG.*

**Kata kunci:** MBG, Kebijakan Publik, Sekolah Dasar, Gizi Anak

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kebijakan strategis pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, menekan angka stunting, dan mendukung capaian pendidikan nasional (Jati & Iriani, 2025). Hal tersebut sebagai fondasi pembangunan SDM yang lebih sehat dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045. Akan tetapi, untuk mencapai SDM yang unggul dan dicita-citakan untuk Indonesia Emas masih menghadapi banyak kendala dan tantangan serius yaitu masalah gizi kronis penyebab stunting (Nango et al., 2025). Berdasarkan artikel dari Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia pada hari Rabu, 18 Desember 2024 bahwa kunci utama kemajuan suatu bangsa ialah melalui pembangunan SDM yang unggul dalam mewujudkan visi Indonesia yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Hasil analisis menunjukkan bahwa program MBG ada sebagai respon atas lanskap gizi yang kompleks yang ditandai dengan tingginya prevalensi stunting, beban ganda malnutrisi, dan kerentanan mikronutrien yang berkelanjutan (Dirawan & Sukriadi, 2026). Maka dari itu, salah satu program utama untuk mendukung agenda tersebut adalah dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu alternatif untuk mencegah stunting yang terjadi di Indonesia (Fanny Ika Septiani et al., 2024). Indonesia menjadi negara tertinggi yang mempunyai riwayat stunting terutama pada balita dan anak-anak. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2024 dalam (Septiani et al., 2024) bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 mencapai sekitar 24%. Angka ini mengalami penurunan sebesar 3% menjadi 21% pada tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, Indonesia tetap termasuk salah satu negara dengan angka stunting tertinggi di dunia, terutama pada balita dan anak-anak. Menurut standar WHO minimal target penurunan stunting seharusnya berada di bawah 20%. Oleh karena itu, pemerintah merancang berbagai program untuk mengatasi masalah stunting pada balita dan anak-anak melalui program MBG. Melalui inisiatif MBG ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil melalui pemberian makanan bergizi secara gratis di sekolah-sekolah dasar.

Meskipun demikian, implementasi program MBG memiliki banyak kontroversi. Berdasarkan penelitian (Ardelia Maharani et al., 2024) bahwa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi program ini ialah dana yang sangat besar untuk menjalankannya, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp 450 triliun. Jika pelaksanaan MBG terlaksana di Kepulauan Belitung, tentunya memiliki tantangan tersendiri seperti pelaksanaan uji coba yang dilakukan di Indonesia Bagian Timur, penelitian yang dilakukan oleh (Fatimah et al., 2024) menunjukkan adanya masalah utama terkait keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Serta distribusi makanan dan kualitas gizi juga bisa menjadi persoalan utama. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung misalnya, berdasarkan informasi dari artikel pemerintah bahwa di Kabupaten Bangka, uji coba MBG telah dilakukan pada tanggal 25 November 2024 di SD Negeri 12 Desa Penyamun, namun evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan efektivitas program ini. Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai dampak program MBG terhadap anggaran pendidikan dan sektor lainnya. Beberapa pihak mengkhawatirkan bahwa alokasi dana untuk program ini dapat mengurangi anggaran yang seharusnya digunakan untuk sektor pendidikan yang dapat memengaruhi kualitas pendidikan di Kepulauan Belitung.

Berdasarkan data-data yang diperoleh terkait berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan MBG tersebut, maka urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya

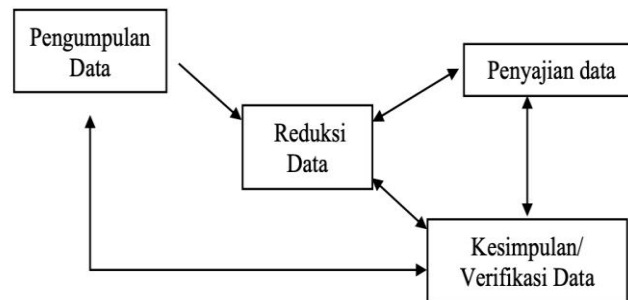
keberhasilan implementasi program MBG dalam meningkatkan status gizi anak-anak di Kepulauan Belitung dapat terlaksana dengan baik. Keberhasilan program ini tidak hanya akan berdampak pada kesehatan anak-anak, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sejalan dengan penelitian (Qomarrullah et al., 2025) bahwa Program MBG merupakan suatu kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah serta dapat mendukung keberlanjutan pendidikan yang memiliki urgensi dalam mengatasi ketimpangan gizi dan mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatas akses makan bergizi. Serta penelitian (Romadoni et al., 2026) bahwa program MBG mendorong adanya pergeseran siswa ke arah yang lebih positif, belajar lebih giat, dan membentuk kebiasaan makan makanan yang bergizi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengoptimalkan pelaksanaan program MBG di tingkat sekolah dasar. Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan peran Badan Gizi Nasional yang dibentuk pada Agustus 2024 untuk mengawasi dan memastikan keberhasilan program MBG di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, evaluasi terhadap uji coba program MBG yang telah dilakukan di beberapa sekolah dasar di Kepulauan Belitung menjadi penting untuk memahami efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Seperti dalam penelitian (Weyana et al., 2025) bahwa tantangan dalam implementasi program MBG berkaitan dengan efisiensi anggaran dan pelaksanaan teknis dilapangan agar dapat mewujudkan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai kebijakan MBG di Kepulauan Belitung, serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi kebijakan MBG yang diterapkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran di Kepulauan Belitung, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di tingkat sekolah dasar dan solusi yang dapat diusulkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga program MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis eksplorasi untuk memperoleh informasi kebijakan MBG di sekolah dasar yang ada di Kepulauan Belitung. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam kondisi alamiah atau *natural setting*, dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder dengan metode yang mengutamakan observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta dokumentasi (Sugiyono, 2013). Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap lingkungan sekolah, interaksi antara siswa dan tenaga pendidik, guru, dan kepala sekolah serta berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan MBG. Selain itu, penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam dengan kepala sekolah, guru, dan siswa untuk memperoleh perspektif yang komperhensif mengenai faktor internal dan eksternal yang berperan dalam kebijakan tersebut. Selain observasi dan wawancara, angket atau kuesioner juga digunakan untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang berkaitan dengan penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi yang mencakup berbagai sumber referensi, seperti buku, artikel ilmiah, tesis, berita nasional, laporan dari lembaga resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Untuk menganalisis data, penelitian ini mengacu pada Model Miles dan Huberman yang melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk menarik kesimpulan. Dalam upaya memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan beberapa teknik validasi, yaitu *credibility* (keabsahan internal), *transferability* (penerapan hasil penelitian dalam konteks lain), *dependability* (konsistensi temuan), dan *confirmability* (objektivitas data) (Sugiyono, 2013). Melalui prosedur yang sistematis ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan solusi dari eksplorasi kebijakan MBG dari Pemerintahan Prabowo-Gibran di Kabupaten Belitung.



**Gambar 1.** Model Analisis Miles dan Huberman (Sugiyono:2013)

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kepulauan Belitung yaitu di SD N 45 Tanjungpandan, SD N 11 Badau, SD N 31 Tanjungpandan, SD N 37 Tanjungpandan, dan SD N 42 Tanjungpandan dengan pertimbangan bahwa sekolah dasar tersebut sebagian telah dilaksanakan uji coba terlebih dahulu dan wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis yang beragam yang dapat mempengaruhi kebijakan MBG yang sedang dicanangkan oleh pemerintahan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Responden dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, dan siswa/siswi dengan jumlah 10 orang per sekolah. Kepulauan Belitung menjadi salah satu daerah yang akan dilakukan penerapan kebijakan MBG yang tentunya memiliki tantangan tersendiri dikarenakan sebagai daerah kepulauan dan tergolong daerah di provinsi yang baru terbentuk maka perlu adanya penyesuaian anggaran dan sebagainya. Pada penelitian sebelumnya yang relevan, telah dijelaskan bahwa yang menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan ini berkaitan dengan hal logistic, penyediaan bahan pangan, dan anggaran yang sangat besar serta keselarasan regulasi untuk menjalankan kebijakan tersebut (Suprpto et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan sebagai kelanjutan dari kajian sebelumnya yang menyoroti terkait pelaksanaan kebijakan MBG yang dicanangkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran, namun lebih spesifik membahas terkait hambatan dan solusi yang dapat diambil dalam penerapan kebijakan tersebut di sekolah dasar Kepulauan Belitung. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan MBG terkait hambatan serta bagaimana solusi yang dapat diambil untuk mengatasi persoalan yang muncul. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemangku kepentingan, termasuk sekolah, pemerintah daerah, dan pemerintahan Prabowo-Gibran secara khusus sebagai bentuk monitoring kebijakan MBG di Kepulauan Belitung. Karena proses monitoring merupakan upaya memantau apakah program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan serta apakah ada hambatan, dan bagaimana para pelaksana kebijakan mengatasi hambatan tersebut (Fionita et al., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat berbagai respon dari pihak sekolah dasar di Kepulauan Belitung. Mayoritas kepala sekolah dan guru menyatakan bahwa program ini dinilai relevan dengan kebutuhan peserta didik, terutama bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Sejalan dengan penelitian (Furkan et al., 2025) bahwa mayoritas guru di sekolah menyambut baik program ini karena manfaatnya langsung dirasakan oleh siswa, terutama dari keluarga kurang mampu. Namun ada beberapa faktor yang menjadi kritik untuk program MBG, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program yang belum berjalan maksimal. Namun, temuan di lapangan memperlihatkan bahwa kebijakan MBG mampu meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah.



Gambar 2. Penelitian di SD N 31 Tanjungpandan

Program MBG ini terbukti mampu meningkatkan motivasi belajar, kehadiran siswa, dan konsentrasi belajar, serta memperkuat interaksi sosial di lingkungan sekolah (Furkan et al., 2025).

Temuan lain menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan program MBG terletak pada aspek logistik dan pendanaan daerah. Pemerintah provinsi masih menunggu pedoman teknis dari pemerintah pusat, khususnya terkait mekanisme penyaluran dana dan tanggung jawab antar lembaga. Beberapa sekolah di daerah Belitung mengeluhkan keterbatasan sarana penyimpanan makanan dan akses distribusi yang kurang memadai. Dari sisi gizi dan kesehatan, hasil observasi terhadap menu yang disediakan menunjukkan bahwa belum semua makanan memenuhi standar kecukupan gizi anak usia sekolah. Beberapa sekolah masih menyajikan makanan dengan kandungan karbohidrat tinggi tetapi rendah protein dan serat. Hal ini mengindikasikan perlunya keterlibatan tenaga ahli gizi atau pihak Puskesmas dalam penyusunan menu harian agar program MBG benar-benar memberikan manfaat optimal bagi tumbuh kembang anak. Serta yang menjadi persoalan utama terkait kebersihan dari dapur MBG itu sendiri. Dimana saat ini, untuk Kepulauan Belitung distribusi atau pelaksanaan MBG masih dihentikan.



**Gambar 3 dan 4.** Kondisi Dapur MBG Belitung

Selain aspek kesehatan, penelitian ini menemukan adanya pengaruh sosial positif dari pelaksanaan MBG di sekolah. Anak-anak cenderung lebih disiplin datang tepat waktu karena menantikan waktu makan bersama di sekolah. Kegiatan makan bersama juga memperkuat interaksi sosial antar siswa dan menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta kesetaraan tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarga. Nilai-nilai ini sejalan dengan semangat pendidikan karakter yang menjadi fokus kebijakan pendidikan nasional. Namun demikian, di beberapa sekolah ditemukan tantangan terkait pengawasan dan kebersihan. Kurangnya tenaga khusus untuk menangani penyajian makanan menyebabkan guru harus merangkap tugas tambahan di luar tanggung jawab utamanya. Beberapa responden menyarankan adanya tenaga khusus seperti *asisten gizi sekolah* atau *kader sekolah sehat* yang dapat membantu memastikan kelayakan dan keamanan makanan yang disajikan kepada siswa.

Dalam konteks kebijakan publik, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sinergi antar instansi pemerintah masih perlu diperkuat. Koordinasi antara Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketahanan Pangan belum berjalan optimal. Setiap instansi masih berfokus pada tupoksi masing-masing tanpa mekanisme integratif yang jelas. Akibatnya, pelaksanaan program MBG di tingkat sekolah seringkali bergantung pada inisiatif kepala sekolah atau komite sekolah semata. Solusi yang ditawarkan oleh beberapa informan kunci mencakup perlunya pembentukan *Tim Pelaksana MBG* di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang melibatkan lintas sektor. Tim ini diharapkan dapat membuat pedoman teknis yang seragam, menetapkan standar gizi, serta mengawasi proses pengadaan dan distribusi makanan. Selain itu, kerja sama dengan UMKM lokal penyedia bahan makanan bergizi juga dapat menjadi strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga kualitas bahan pangan yang digunakan. Dari sisi keberlanjutan, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya bergantung pada dana pusat. Beberapa kepala sekolah di Belitung mengusulkan alokasi APBD khusus untuk mendukung keberlangsungan program MBG, terutama dalam tahap awal sebelum dana pusat disalurkan secara rutin. Dukungan masyarakat, lembaga swadaya, dan sektor swasta juga perlu ditumbuhkan melalui skema kemitraan sosial seperti *corporate social responsibility (CSR)* di bidang pendidikan dan gizi anak. Berdasarkan temuan dilapangan bahwa pihak sekolah tidak dilibatkan secara langsung terkait anggaran MBG tersebut. Pihak sekolah hanya menerima dari pihak pengelola MBG yang telah ditugaskan untuk mengelola dan mengantarkan makanan ke sekolah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis merupakan langkah progresif untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak pendidikan dasar. Namun, implementasi di Kepulauan Belitung masih menghadapi tantangan pada aspek teknis, koordinasi lintas sektor, dan keberlanjutan pendanaan serta

kebersihan dapur MBG yang menjadi persoalan utama. Dengan penyusunan pedoman yang jelas, pelibatan tenaga ahli gizi, serta sinergi antar lembaga pemerintah dan masyarakat, program ini berpotensi menjadi model keberhasilan nasional dalam mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

### **Pembahasan**

#### **Relevansi Kebijakan MBG terhadap Peserta Didik**

Program MBG dipandang relevan oleh mayoritas kepala sekolah dan guru. Temuan ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi kuat bahwa kebijakan tersebut menjawab kebutuhan dasar siswa, khususnya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah yang berkaitan dengan pemenuhan gizi anak. Sejalan dengan penelitian (Priyono et al., 2026) bahwa siswa penerima program MBG mengalami peningkatan energi dan konsentrasi belajar, dengan skor PPH sebesar 89 (kategori sedang) serta membantu meringankan beban gizi, terutama bagi siswa dari keluarga rentan. Dari perspektif teori kebijakan publik, program ini termasuk dalam kategori *responsive policy*, yaitu kebijakan yang lahir dari kebutuhan nyata sebagian masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan dukungan dari pihak sekolah terhadap program MBG yang dapat memperkuat asumsi bahwa intervensi berbasis gizi memiliki hubungan langsung dengan akses pendidikan yang lebih baik, terutama dalam konteks daerah. Namun, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendalam.

Peningkatan kehadiran siswa menjadi salah satu temuan penting. Hal ini menunjukkan bahwa MBG tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada perilaku pendidikan. Secara sosiologis, insentif berupa makanan mampu menjadi *pull factor* yang efektif dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Temuan ini sejalan dengan pengetahuan umum bahwa program bantuan langsung di sektor pendidikan seringkali meningkatkan motivasi eksternal siswa. Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut apakah efek ini bersifat jangka panjang atau hanya sementara. Sejalan dengan penelitian (Rasyid et al., 2025) bahwa MBG menyediakan makanan bergizi yang mendukung kesehatan dan konsentrasi belajar anak-anak, sehingga memberikan dampak positif terhadap kehadiran di sekolah dan prestasi akademik. Serta, implementasi program MBG memberikan dampak positif terhadap peningkatan focus siswa, kesiapan belajar, motivasi, dan suasana pembelajaran yang aktif dan kondusif (Risnawati et al., 2025).

#### **Pendanaan sebagai Masalah Struktural**

Permasalahan pendanaan menunjukkan bahwa kebijakan ini belum didukung oleh sistem tata kelola yang matang. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa pemerintah daerah masih bersifat menunggu (*waiting policy*) yang berpotensi menghambat keberlanjutan program. Interpretasi dari temuan ini adalah bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh ide, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan kejelasan pembagian kewenangan. Ini juga menjelaskan mengapa di beberapa wilayah program MBG justru terhenti. Program yang bersifat top-down tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung cenderung kurang berkelanjutan dan kurang kontekstual dengan karakteristik suatu wilayah. Untuk itu, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan sekolah, orang tua, pemerintah daerah, pelaku usaha pangan lokal, dan masyarakat dalam menciptakan sistem pemenuhan gizi yang adaptif dan berkelanjutan (Iriawan, 2026). Keberhasilan program MBG bergantung pada berbagai faktor, termasuk stabilitas kebijakan, kolaborasi multilevel di antara para pemangku kepentingan, mekanisme pengelolaan pangan yang efektif, dan evaluasi program secara berkala (Sari et al., 2025).

### **Ketidaksesuaian Standar Gizi dan Minimnya Keterlibatan Ahli**

Temuan terkait dominasi karbohidrat dan rendahnya protein serta serat mengindikasikan bahwa program belum sepenuhnya berbasis *evidence-based nutrition*. Hal ini memperlihatkan adanya celah antara tujuan kebijakan (peningkatan gizi) dengan realisasi di lapangan. Dari sudut pandang kesehatan masyarakat, keterlibatan tenaga ahli gizi menjadi krusial. Tanpa intervensi profesional, program berisiko hanya menjadi bantuan makanan biasa, bukan intervensi gizi yang berdampak pada tumbuh kembang anak. Serta temuan lain dilapangan ialah beberapa siswa memilih untuk tidak mengkonsumsi makanan yang diberikan sehingga mengakibatkan makanan tersebut tidak dikonsumsi dengan baik. Jika penyediaan makanan seimbang dan bergizi terpenuhi, maka secara langsung mengatasi defisiensi mikronutrien yang umum dialami anak-anak Indonesia, termasuk zat besi, vitamin A, dan nutrisi penting lainnya yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak (Alinda et al., 2025).

### **Persoalan Kebersihan sebagai Risiko Serius dalam Implementasi**

Isu kebersihan dapur MBG menjadi temuan krusial yang bahkan berdampak pada penghentian sementara program di beberapa wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan (*food safety*) belum menjadi prioritas utama dalam implementasi awal. Jika dikaitkan dengan standar pelayanan publik, kondisi ini merupakan bentuk *policy risk* yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Dari aspek implementasi, beberapa sekolah dasar di wilayah kabupaten belitung melakukan uji coba distribusi makanan bergizi melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan dan penyedia katering lokal. Pola distribusi dilakukan setiap pagi menjelang jam pelajaran pertama. Namun, terdapat beberapa keterlambatan distribusi dan variasi dalam kualitas serta jenis makanan yang diberikan, yang menunjukkan perlunya standar gizi dan pedoman pelaksanaan yang lebih seragam. Hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan MBG meliputi keterlambatan distribusi, keterbatasan variasi menu, pengucilan pemasok lokal kecil, serta pemantauan dan evaluasi yang tidak memadai (K.S et al., 2025).

### **Beban Tambahan Guru sebagai Indikasi Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia**

Keterlibatan guru dalam tugas penyajian makanan menunjukkan adanya *role overload*. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran karena guru harus menjalankan fungsi di luar tugas utamanya. Temuan ini menegaskan pentingnya tenaga khusus seperti asisten gizi atau kader sekolah sehat sebagai bagian dari desain kebijakan yang lebih komprehensif dan perbaikan pengelolaan program. Pentingnya perbaikan tata kelola program, penguatan regulasi, serta integrasi kebijakan gizi dan Pendidikan dalam pelaksanaan program tersebut (Hasibuan et al., 2025).

### **Tidak Dilibatkannya Sekolah dalam Pengelolaan Anggaran MBG**

Temuan bahwa sekolah tidak terlibat dalam pengelolaan anggaran menunjukkan adanya pendekatan *top-down* yang cukup kuat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil sekolah dengan program yang dijalankan. Keterlibatan sekolah sebenarnya penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program. Sejalan dengan penelitian (Ariyani et al., 2026) yang menunjukkan bahwa jika sekolah dan masyarakat terlibat dalam proses evaluasi melalui pemberian masukan dan penyampaian keluhan, maka dapat memperkaya informasi bagi pengelola program dan memungkinkan adanya perbaikan berbasis kebutuhan lapangan.

Jika dibandingkan dengan praktik program gizi sekolah di berbagai literatur, idealnya program semacam ini melibatkan standar gizi ketat, pengawasan kesehatan, dan sistem distribusi yang higienis yang diawasi oleh pihak sekolah. Penyimpangan yang ditemukan dalam penelitian ini terutama pada aspek gizi dan kebersihan menunjukkan bahwa

implementasi MBG masih belum mencapai praktik terbaik (*best practice*). Serta dalam penerapannya sekolah hanya menjadi wadah pelaksanaan program tanpa terlibat lebih jauh. Pada implementasi program MBG menghadapi berbagai tantangan serius, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil, lemahnya pengawasan kualitas makanan, serta beban fiskal yang tinggi (Muh et al., 2025).

**Tabel 1.** Tabel Pembahasan Tantangan dan Solusi

Indikator Pembahasan	Tantangan	Solusi
Relevansi Kebijakan MBG terhadap Peserta Didik	Peningkatan kehadiran siswa berpotensi bersifat sementara (hanya karena insentif makanan) dan belum ada indikator evaluasi keberhasilan MBG non-akademik secara sistematis.	Mengintegrasikan MBG dengan program pendidikan karakter dan motivasi intrinsik serta penyusunan indikator evaluasi jangka panjang (kehadiran, partisipasi, prestasi) peserta didik.
Pendanaan sebagai Masalah Struktural	Program MBG sepenuhnya memiliki ketergantungan pada dana pusat yang menyebabkan program tidak stabil.	Diberikan diversifikasi sumber pendanaan dari APBD, CSR, dan kemitraan lokal.
Ketidaksesuaian Standar Gizi dan Minimnya Keterlibatan Ahli	Menu yang belum memenuhi kebutuhan gizi seimbang anak dan minimnya keterlibatan tenaga ahli gizi untuk setiap dapur MBG dalam penyusunan menu yang berpotensi makanan tidak dimanfaatkan dengan baik.	Perlu melibatkan ahli gizi dari Puskesmas atau Dinas Kesehatan secara langsung untuk setiap dapur MBG dan menyusun standar menu berbasis kebutuhan kalori dan nutrisi anak sekolah.
Persoalan Kebersihan sebagai Risiko Serius dalam Implementasi	Standar kebersihan dapur dan distribusi belum terjamin serta risiko keracunan atau gangguan kesehatan siswa.	Penerapan standar <i>food safety</i> (SOP kebersihan dapur dan distribusi) sesuai ketentuan SGN dan melakukan inspeksi rutin oleh dinas terkait.
Beban Tambahan Guru sebagai Indikasi Ketidaksiapan Sumber Daya Manusia	Guru mengalami <i>overload</i> tugas di luar fungsi utama dan berpotensi menurunkan kualitas pembelajaran.	Menyediakan tenaga khusus (asisten gizi/kader sekolah sehat) dan Membagi peran secara jelas antara tenaga pendidikan dan tenaga pendukung.
Tidak Dilibatkannya Sekolah dalam Pengelolaan Anggaran MBG	Daerah belum mandiri dalam pembiayaan program, risiko terhentinya program saat dana pusat terlambat, dan kurangnya keterlibatan sekolah secara langsung dalam pengelolaan anggaran MBG.	Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD, meningkatkan kemitraan dengan sektor swasta dan Masyarakat, serta menerapkan pendekatan <i>school-based management</i> .

### Arah Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa arah penelitian ke depan dapat dikembangkan: studi berkelanjutan untuk melihat dampak jangka panjang MBG terhadap prestasi akademik

dan kesehatan siswa serta penelitian tentang efektivitas keterlibatan UMKM lokal dalam menjaga kualitas dan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa MBG merupakan kebijakan yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan implementatif. Temuan empiris dari wawancara memperlihatkan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh aspek teknis, koordinasi, dan kualitas pelaksanaan di lapangan. Dengan perbaikan pada aspek standar gizi, kebersihan, pendanaan, serta sinergi antar lembaga, program ini berpeluang menjadi model kebijakan nasional yang tidak hanya meningkatkan kesehatan anak, tetapi juga memperkuat sistem pendidikan dasar secara menyeluruh. Program MBG harus dikelola sebagai instrumen kebijakan pendidikan yang bergantung pada tata kelola, bukan sekadar intervensi pemberian makan. Memperkuat standar teknis dan pemantauan, membangun kompetensi manajerial di tingkat sekolah, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan melembagakan mekanisme partisipatif untuk mencapai dampak yang adil, efisien, dan berkelanjutan di berbagai konteks regional (Monalisa, 2026).

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan program strategis yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan anak usia sekolah dasar (kualitas gizi anak dan stunting) di Kepulauan Belitung. Implementasi awal program menunjukkan dampak positif, khususnya dalam peningkatan kehadiran siswa serta penguatan interaksi sosial di lingkungan sekolah melalui kegiatan makan bersama yang menumbuhkan nilai kebersamaan, kedisiplinan, dan kepedulian sosial, sejalan dengan tujuan pendidikan karakter nasional. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan logistik, belum adanya standar gizi yang seragam, kekurangan tenaga pengelola khusus, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, serta kondisi kebersihan dapur MBG yang belum sepenuhnya memenuhi Standar Gizi Nasional (SGN). Selain itu, dari sisi teknis, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk penyimpanan, penyajian, dan pengawasan kebersihan makanan, sementara kondisi geografis Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari pulau-pulau kecil turut menjadi kendala dalam distribusi makanan bergizi secara merata. Oleh karena itu, Solusi untuk keberlanjutan dan efektivitas program MBG memerlukan dukungan kebijakan lintas sektor serta pembiayaan yang berkelanjutan, dengan melibatkan peran aktif pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat agar implementasinya dapat berjalan optimal di wilayah kepulauan.

## REFERENSI

- Alinda Maliki, Nanda Selvi, Amalia Arifah, N. S. A. (2025). Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran dan Dampaknya Terhadap Kesehatan dan Bidang Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(April), 465–476.
- Ardelia Maharani, P., Riyani Namira, A., & Viony Chairunnisa, T. (2024). Peran Makan Siang Gratis Dalam Janji Kampanye Prabowo Gibran Dan Realisasinya. *Jolasos : Journal of Law and Social Society*, 1–10.
- Ariyani, N., Dema, H., Irwan, I., Muhammadiyah, U., Rappang, S., Kebijakan, I., & Kelola, T. (2026). Implementasi Kebijakan Dan Tata Kelola Makanan Bergizi Gratis Pada Tingkat Satuan Pendidikan : Studi Kasus Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng. *Jurnal Papatung*, 9(2), 1–11.
- Dirawan, G. D., & Sukriadi, A. (2026). Beyond School Feeding : Makan Bergizi Gratis ( MBG )

- as a Life-Course Nutrition and Human Capital Policy in Indonesia. *Pinisi Journal Of Education*, 6(2), 99–114.
- Fanny Ika Septiani, Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL*, 1(2). <https://journalwbl.com/index.php/jupensal/article/view/176/42>
- Fatimah, S., Rasyid, A., & Arwakon, H. O. (2024). Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan Pendahuluan. 4(1), 14–21.
- Fionita, W., Lauchia, R., Windari, S., & Wijaya, H. A. (2024). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 5732–5739. <https://www.jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/4535/3709>
- Furkan, I. M., Sari, R. A., Eliza, M. F., Nofrizal, D., Junva, F., & Gistituati, N. (2025). Mewujudkan Makan Bergizi Gratis : Perspektif Guru Sd. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(3), 919–927.
- Hasibuan, A. T., Dalimunte, T., & Sahlan. (2025). Dari Piring Ke Prestasi : Dampak Makanan Bergizi Gratis Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 16(25).
- Iriawan, H. (2026). Sosialisasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis di SD Inpres Saramom. *Jurnal Abdimas Kesosi*, 9(1).
- Jati, A. K., & Iriani, A. (2025). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia. *Journal Of Multidisciplinary Research and Development*, 8(1), 700–711.
- Monalisa. (2026). Implementation Of The Free Nutritious Food Program And The Quality Of Education : An Educational. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 15(1), 455–466.
- Muh, A., High, F., Syahreza, A., Ruzadi, N., & Said, M. R. (2025). Analisis Kebijakan Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran dan Dampaknya dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(5), 655–664.
- Nango, M., Purwoko, B., & Hazim, M. (2025). Makan Bergizi Gratis : Strategi Kebijakan Publik Menuju Generasi Emas Indonesia 2045. *Jurnal Pendidikan Agama Katolik (JPAK)*, 25(2), 354–368.
- Priyono, A. F., Riyanta, S., & Daryanto, E. (2026). Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Pendekatan Kerawanan Pangan Siswa Sman 42 dan SMAS Angkasa 1 di Jakarta Timur. *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, 5(3), 1339–1354.
- Qomarrullah, R., Suratni, S, L. W., & Sawir, M. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesehatan Dan Keberlanjutan Pendidikan The Long-Term Impact Of The Free Nutritious Meal Program On Health And Educational Sustainability. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 5(2), 130–137. <https://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/660/483>
- Rasyid, H., Masruri, G. G., Nugraha, H., & Hidayat, A. (2025). Free Nutritious Meal Policy From The Perspective Of Food Security , Education , And Social Justice. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam*, 1–13.
- Risnawati, E., Suriansyah, A., Mulya, A., Harsono, B., Pendidikan, P., Sekolah, G., & Keguruan, F. (2025). Implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Peningkatan Efektivitas Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner (JPIM)*, 02(04), 832–842.
- Romadoni, E., Putri, A., & Hanindraputri, E. K. (2026). Pengalaman Siswa Dalam Mengikuti Program Makan Bergizi Gratis ( Mbg ) Di Smpn 19 Surabaya. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 1–13.

- S, F. A. D. K., Sari, W. I. R., & Rachmaliana, L. (2025). Government Social Policy : Implementation of The Free Nutritious Meal Program ( MBG ). *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 27, 134-142.
- Sari, N. H., Lionardo, A., Thamrin, M. H., & Putra, R. (2025). Free School Meals Policy as a Learning Framework for MBG in Indonesia : A Systematic Literature Review. *Journal of Universal Studies*, 5(10).
- Septiani, F. I., Rosiana, N., & Azzahra, A. (2024). Dampak Makan Siang Gratis Pada Kondisi Keuangan Negara Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *JUPENSAL*, 1(2), 192-196.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (19th ed.). Alfabeta.
- Suprpto, F. A., Praditya, E., Dewi, R. M., & Adiyoso, W. (2025). A Policy Implementation Review of the Free Nutritious Meal ( MBG ) Program. *The Journal Of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 297-312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.798>
- Weyana, A., Khatimah, N., Kamaruddin, S. A., & Awaru, A. O. T. (2025). Rasionalisme Dalam Kebijakan Publik : Analisis Dampak Program Makan Bergizi Gratis Terhadap Kesejahteraan Pelajar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 1969-1976. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.815>

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

**CC-BY-SA**